

Bupati Berau Ingatkan OPD Kendalikan Biaya Perjalanan Dinas, Prioritaskan Koordinasi Efisien



Sumber Gambar: KORANKALTIM Kamis, 08/01/2026

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB — Dinamika anggaran yang fluktuatif serta kebijakan fiskal pemerintah pusat menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk lebih cermat dalam mengelola belanja daerah. Meski demikian, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap bergerak cepat menjalankan program kerja tanpa membebani kas daerah secara berlebihan. Bahkan ia menyoroti penggunaan anggaran perjalanan dinas (SPPD) yang dinilai perlu diperketat agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, efisiensi bukan berarti memutus komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian di tingkat pusat. Justru, koordinasi yang intensif tetap diperlukan agar program daerah yang tidak terakomodasi dalam APBD bisa memperoleh dukungan pendanaan dari luar daerah.

“Kita harus punya koordinasi yang baik, memohon ke Gubernur atau kementerian sesuai tupoksi masing-masing OPD. Sering koordinasi itu wajib, tapi bukan berarti harus sering-sering berangkat,” kata Sri. Koordinasi tidak selalu harus dilakukan melalui kunjungan tatap muka. Pemanfaatan teknologi, seperti *Zoom Meeting*, disebutnya menjadi solusi utama dalam menekan biaya perjalanan. Pertemuan fisik kini diposisikan sebagai opsi terakhir, hanya dilakukan bila urgensinya tidak dapat digantikan melalui komunikasi virtual. Untuk perjalanan dinas yang memang harus dilakukan, Bupati meminta agar jumlah personel yang berangkat dibatasi.

Cukup kepala dinas atau pejabat terkait yang benar-benar diperlukan, ditambah pendamping seperlunya. “Kalau berangkat untuk kepentingan pribadi, tidak boleh pakai uang negara. Itu juga tidak boleh lama-lama, paling lama dua hari. Berangkat, datang, pulang besoknya karena semakin lama semakin mahal,” ujarnya. Langkah efisiensi ini diharapkan dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih terukur dan berdampak

langsung pada masyarakat, sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan meski menghadapi tekanan fiskal.

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Bupati Berau Ingatkan OPD Kendalikan Biaya Perjalanan Dinas, Prioritaskan Koordinasi Efisien, 08/01/2026

Catatan:

1. Dalam Diktum Keempat angka 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Presiden menginstruksikan antara lain kepada Gubernur/Wali Kota salah satunya untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2024 menyatakan bahwa setelah melaksanakan Perjalanan Dinas, diwajibkan membuat laporan hasil perjalanan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah.